

SUARA RAKYAT, SUARA TUHAN?
Suatu Penafsiran Terhadap Keinginan Israel
Meminta Seorang Raja

Yohanes Krismantyo Susanta

Pendahuluan

Pada tahun 2014 yang akan datang, Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika banyak orang yang tertarik untuk mengajukan diri sebagai calon legislatif, mulai memperkenalkan diri dengan tujuan dikenal oleh masyarakat. Pemilu merupakan salah satu perwujudan dari aspirasi rakyat. Dengan adanya pemimpin-pemimpin yang baru (atau lama) yang nantinya terpilih, rakyat mengharapkan keadaan yang lebih baik akan tercipta demi kemajuan bangsa dan demi kesejahteraan rakyat. Hal tersebut berarti rakyat memiliki peran besar dalam

memilih seorang pemimpin, termasuk pemimpin negara. Seorang pemimpin yang mengatur jalannya pemerintahan. Kerinduan akan kehadiran seorang pemimpin yang amanah menjadi harapan setiap bangsa di dunia. Pemilu merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan ini juga dianut oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Sistem pemerintahan demikian menempatkan rakyat sebagai pihak yang berdaulat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dengan perkataan lain, suara rakyat diidentikkan sebagai suara Tuhan yang dikenal dengan istilah *vox populi vox Dei*. Rakyat menjadi wakil Tuhan. Dengan demikian, suara rakyat harus didengarkan sebab suara rakyat adalah suara Ilahi. Akan tetapi hal tersebut sekaligus meninggalkan pertanyaan, apakah suara rakyat identik dengan suara Tuhan? Apakah kehendak rakyat merupakan kehendak Tuhan?

Dari, Oleh dan Untuk Rakyat

Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (δῆμος (*dêmos*) “rakyat” dan κράτος (*kratos*) “kekuatan” atau “kekuasaan”).¹ Sistem pemerintahan demokrasi

1. Nigel Guy Wilson, *Encyclopedia of Ancient Greece* (New York: Routledge, 2006) s.v. “δημοκρατία.”

lahir dan dikembangkan pada abad ke-15 (zaman *renaissance*).²

Menurut L. Sihombing yang mengutip Rousseau:

Negara pada dasarnya adalah perjanjian sosial antara para warga negaranya yang disebut kontrak sosial. Dengan demikian, satu-satunya yang berdaulat di dalam negara adalah “*volonte generale*” yaitu kehendak bersama rakyat. Cara memperolehnya yaitu dengan mendengarkan kehendak golongan terbesar (mayoritas) karena masing-masing orang harus menyesuaikan diri dengan mayoritas. Masing-masing golongan harus tunduk kepada “kehendak rakyat.”³

Sistem pemerintahan demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang dapat menampung aspirasi rakyat sehingga kesejahteraan rakyat dapat terjamin dan negara juga dapat maju dan berkembang. Akan tetapi, seiring dengan arus reformasi yang terjadi khususnya di Indonesia, maka suara rakyat selalu dikedepankan. Tak jarang atas nama suara mayoritas, maka peraturan pemerintah sekalipun ingin diubah berdasarkan kehendak mayoritas. Kondisi tersebut kerap kali terjadi di bumi Indonesia ini. Beberapa tahun yang lalu terjadi penganiayaan dan ancaman dari pihak mayoritas yang tidak menyukai keberadaan Ahmmadiyah. Kejadian serupa juga menimpa Ibu Susan, lurah Lenteng Agung yang mengalami penolakan dari sejumlah warga

2. Lotnatigor Sihombing, “Peranan Gereja Dalam Negara” (makalah dipresentasikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKY Cimone ke-25, 5 Agustus 2011).

3. Sihombing, “Peranan Gereja Dalam Negara,” 3-4.

yang tidak menghendaknya menjadi lurah dengan alasan berbeda keyakinan. Pertanyaan yang kembali mengemuka adalah apakah kehendak mayoritas tersebut sudah pasti sejalan dengan kehendak Tuhan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan memaparkannya dengan terlebih dahulu membandingkannya dengan peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah umat Allah di Perjanjian Lama yakni Israel. Di dalam sejarah bangsa Israel, ketika Israel baru terbentuk menjadi suatu bangsa, khususnya pada zaman Musa, mereka belum menganut sistem pemerintahan dunia apapun sebab TUHAN sendiri yang menjadi pemimpin atas mereka (sistem pemerintahan teokrasi). Setelah Musa dan Yosua meninggal, bangsa Israel diperintah oleh seorang hakim dengan Samuel sebagai salah satu hakim Israel. Pada masa Samuel inilah kemudian terjadi peralihan dari pemerintahan melalui hakim ke pemerintahan melalui raja. Rakyat Israel sendiri mengharapkan seorang pemimpin baru di tengah-tengah mereka. Israel kemudian memulai sejarah baru dalam sistem pemerintahan mereka. Akan tetapi hal tersebut juga mengundang pertanyaan: apakah keinginan Israel itu sejalan dengan kehendak Allah? Apakah ini adalah bentuk aspirasi rakyat Israel untuk mengadakan gerakan reformasi? Hal ini sekaligus menggemakan kembali pertanyaan: Apakah ini berarti suara rakyat, suara Tuhan (*vox populi, vox Dei*)?

Israel Meminta Seorang Raja

Di dalam 1 Samuel 8:5, bangsa Israel berkata kepada Samuel: “maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain.” 1 Samuel mencatat bahwa perkataan tersebut mengesalkan hati Samuel, tetapi Allah kemudian berfirman kepadanya, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi Akulah yang mereka tolak, supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka" (1 Sam. 8:7).

Allah sebelumnya menjadi raja atas Israel, tetapi Israel menginginkan raja lain, sama seperti bangsa-bangsa lain. Menurut Walter Bruegemann, “frasa Tuhan itu raja dikaitkan dengan model-model politis yang dikenal oleh Israel dalam dunia kuno. Allah sebagai raja adalah suatu cara kesaksian tentang karya Yahweh dalam menata ciptaan sebagai suatu tempat yang dapat didiami dan sejahtera.”⁴ Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa sebenarnya Allah sendiri yang menjadi raja atas bangsa Israel. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Gideon, “Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu tetapi TUHAN yang memerintah kamu" (Hak. 8:23).⁵

4. Walter Bruegemann, *Teologi Perjanjian Lama: Kesaksian, Tangkisan, Pembelaan* (Maumere: Ledalero, 2009), 364.

5. Bruegemann, *Teologi Perjanjian Lama*, 907.

Allah adalah raja Israel. Pernyataan tersebut juga dinyatakan dengan tegas dalam 1 Tawarikh 16:31 dan Mazmur 96:10: "Tuhan itu Raja!"⁶ Persoalan kemudian muncul ketika Israel meminta seorang raja bagi mereka. Permintaan Israel ini sesungguhnya didasari oleh kenyataan bahwa mereka (Israel) melihat bangsa-bangsa di sekitarnya memiliki seorang raja manusia yang memerintah atas mereka. Israel dalam perjumpaannya dengan bangsa-bangsa lain melihat bahwa kedudukan raja sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Menurut penulis, kemungkinan, Israel mempelajari hal tersebut ketika mereka berada di Mesir. Mesir pada saat itu dipimpin oleh Firaun, seorang raja yang sangat ditakuti oleh bawahannya. Selain itu, tentu saja Israel berjumpa dengan bangsa-bangsa lain seperti Filistin, Amalek dan Midian (yang seringkali terlibat peperangan dengan mereka), yang juga memiliki seorang raja dan sistem pemerintahan sendiri.

Keinginan Israel ini, di satu sisi nampak sangat wajar tetapi sekaligus mengindikasikan bahwa Israel mudah terpengaruh dengan budaya atau lingkungan di mana mereka hidup. Sebelumnya, mereka jatuh terhadap sinkretisme yang menyebabkan berkali-kali Allah murka dan menjatuhkan hukuman atas mereka. Sinkretisme itu sendiri terjadi ketika Israel hidup bersama dengan bangsa lain yang menyembah para dewa.

6. Marthinus Theodorus Mawene, *Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 51.

Berhadapan dengan persoalan ini, beberapa penafsir meyakini bahwa keinginan Israel untuk meminta seorang raja adalah salah. Pemerintahan monarki yang dikehendaki oleh Israel memunculkan penafsiran anti-monarki, di mana Yahweh dan narator kitab Samuel sepakat bahwa monarki tidak dapat diterima dan merupakan tindakan menolak Yahweh.⁷

Dalam teks 1 Samuel 8 terlihat jelas bahwa Israel telah meminta seorang raja dan Samuel telah memberikan peringatan bahwa seorang raja tidak akan membawa kedamaian dan keadilan tetapi Israel sebaliknya harus melayani sang raja yang haus kuasa. Tindakan tersebut juga mempunyai konsekuensi logis bahwa Allah tidak akan mendengarkan mereka ketika raja mereka bertindak tidak seperti yang mereka harapkan.⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kondisi zaman di mana Israel hidup, mereka memandang perlu adanya seorang raja yang akan memimpin mereka dari serangan musuh-musuh Israel sekaligus menegaskan eksistensi mereka sebagai suatu bangsa, sama seperti bangsa lain yang hidup pada zaman itu di sekitar mereka. Meskipun

7. Penafsiran ini sejalan dengan Hak. 8:22-23: monarki manusia memelorotkan pemerintahan Yahweh yang sah. Lih: Bruegemann, *Teologi Perjanjian Lama*, 907. Berbeda dengan hal itu, Christopher Wright berpendapat bahwa keinginan akan hadirnya seorang raja muncul dari beberapa motif Israel yang tercampur, ada yang kelihatan baik (keinginan akan keadilan dan pemimpin yang bersih), ada yang tidak baik (keinginan untuk menjadi sama dengan bangsa lain). Lih: Christopher Wright, *Hidup sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 119.

8. Ralph W. Klein, *1 Samuel*, Word Biblical Commentary (Dallas: Word Book Publisher, 1998), 79.

keinginan Israel ini bertentangan dengan kehendak Allah, namun keinginan tersebut dikabulkan oleh Allah.

Suara Rakyat, Suara TUHAN?

Jika hanya berbicara konteks 1 Samuel 8, maka jelaslah bahwa kehendak Israel dalam meminta seorang raja tampaknya tidak sejalan dengan kehendak Allah, sebab Allah sendiri mengatakan bahwa Israel menolak diri-Nya sebagai raja. Tetapi kemudian timbul persoalan terkait pernyataan bahwa Tuhanlah yang berprakarsa mengangkat raja bagi Israel (1 Sam. 9:1-10, 16; 11:1-15).⁹ Sebagai contoh, Christopher Barth mengatakan bahwa pengangkatan raja adalah hak prakarsa Tuhan,

Dalam bahasa Ibrani, mengangkat raja adalah bentuk kausatif, yakni himlik, dari kata kerja malak (memerintah sebagai raja). Allah juga dikatakan memilih (Ibrani, bakhar) orang yang akan diangkat (1 Sam. 10:24; 16: 8-10; 2 Sam. 6:21; 1 Raj. 8:16). Ulangan 17:15 bahkan menetapkan bahwa hanya seorang yang sudah dipilih Tuhan dapat diangkat sebagai raja.¹⁰

Hal tersebut kemudian memunculkan penafsiran yang pro-monarki sebagai tandingan dari penafsiran anti-monarki.¹¹ Berhadapan dengan permasalahan tersebut, Brueggemann

9. Christoph Barth dan Marie-Claire Barth-Frommel, *Teologi Perjanjian Lama 2* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 61.

10. Barth dan Barth-Frommel, *Teologi Perjanjian Lama 2*, 64.

11. Walter Brueggemann dan Tod Linafelt, *An Introduction to the Old Testament: The Canon and Christian Imagination* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2012), 165.

mengutip pendapat Dennis J. McCharty yaitu monarki tidak diberikan begitu saja tanpa terlebih dahulu tradisi teokratis dimaklumkan:¹²

Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu: anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya; ia akan menjadikan mereka kepala pasukan seribu dan kepala pasukan lima puluh; mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya; senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmumu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya dari gandummu dan hasil kebun anggurmumu akan diambilnya sepersepuluh dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya sepersepuluh, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi TUHAN tidak akan menjawab kamu pada waktu itu (1 Sam. 8:11-18).

Sebagai perbandingan, Allah bukan hanya berperan sebagai raja. Ia berperan juga sebagai hakim. Barth dengan tepat mengatakan, Allah pada intinya adalah hakim namun memang

12. Brueggemann, *Teologi Perjanjian Lama*, 907.

benar juga bahwa Ia juga mengangkat hakim.¹³ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan Israel sebelumnya ataupun tindakan Allah lainnya, murni merupakan inisiatif Allah sendiri. Tetapi ketika Israel menginginkan raja dan Allah kemudian mengangkat raja bagi mereka, ini berasal dari inisiatif Israel sendiri. Dalam hal ini, penulis setuju dengan Christopher Wright yang dengan tepat mengatakan bahwa cerita berdirinya kerajaan Israel Israel karena faktor manusiawi, tidak ada perintah Allah untuk membentuk kerajaan itu. Kitab Ulangan memang menyebutkan kemungkinan bahwa bangsa itu akan meminta seorang raja: “Apabila ... engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku” tampaknya *mengizinkan* permintaan itu asalkan mereka mengangkat “raja yang dipilih Tuhan Allahmu” (Ul. 17:14-15). Tetapi jelas, itu merupakan izin saja, bukanlah apa yang langsung dikehendaki Allah.¹⁴

Keinginan Israel untuk mempunyai seorang raja memang dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi raja Israel yang memerintah tidaklah sama dengan pemerintahan sejenis itu di bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Menurut penulis, raja-raja bangsa lain memiliki kuasa penuh atas rakyatnya, bahkan beberapa dari mereka dianggap sebagai titisan dewa sehingga mereka disembah. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kisah Alkitab, misalnya raja Firaun dan Nebukadnezar. Raja Israel tidak sama dengan itu. Secara logika,

13. Barth dan Barth-Frommel, *Teologi Perjanjian Lama 2*, 59.

14. Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah*, 118.

mereka (raja-raja tersebut) diangkat oleh Allah, artinya pihak yang mengangkat tentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang diangkat.

Perbedaan lain antara raja Israel dengan raja-raja bangsa-bangsa lain adalah raja-raja bangsa lain memerintah berdasarkan garis keturunan atau berdasarkan intrik politik misalnya pemberontakan atau aksi makar. Menurut penulis, pemerintahan raja Israel tidak demikian, sebagai contoh pengganti Saul bukanlah Yonatan, anaknya, melainkan Daud. Sekali lagi, peran Allah yang selalu ingin ditonjolkan oleh penulis Alkitab, yaitu bahwa Allah sendiri yang berdaulat atas bangsa Israel dengan memerintah melalui seorang raja dunia. Di samping itu, menurut Wright, meskipun kerajaan berasal dari manusia dan sejak permulaannya ada kecenderungan untuk murtad dan menyeleweng, namun Allah mengangkat dan menjalin kerajaan itu dalam inti rencana penebusan-Nya.¹⁵ Maka, seorang manusia yang memerintah sebagai raja—dan mengakui Tuhan sebagai Rajanya—bertanggung jawab penuh atas tindakannya, ia berdiri di bawah Allah dan hukum-Nya, baik dalam jabatan maupun hidup pribadinya.¹⁶

Menurut penulis, permintaan Israel akan adanya seorang raja telah menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. *Pertama*, memang benar mereka mengharapkan pemimpin yang adil dan bersih tetapi mereka lupa bahwa Allah sendiri adalah pemimpin

15. Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah*, 120.

16. Barth dan Barth-Frommel, *Teologi Perjanjian Lama 2*, 257.

yang sempurna. Tidak ada seorang raja manusia yang dapat memerintah dengan sempurna. Hal tersebut jelas memiliki indikasi bahwa mereka tidak menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Akibatnya, mereka mengalami kekecewaan dan kesengsaraan di kemudian hari. *Kedua*, pernyataan dan keinginan mereka untuk menjadi *sama* dengan bangsa lain, telah membuat identitas mereka sebagai umat pilihan yang dikhususkan bagi Allah, menjadi kabur. Mereka telah melupakan identitas mereka sehingga mereka tidak ada lagi bedanya dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena sikap mereka yang tegar tengkuk itu, mereka menuai bencana. Sejarah Israel mencatat bahwa beberapa orang raja Israel banyak yang kelakumannya jahat di mata Tuhan terlebih lagi setelah kerajaan tersebut pecah menjadi dua. Penulis juga berpandangan bahwa sistem kerajaan yang dianut Israel “tidak seperti maksud semula” yang Allah rencanakan—meminjam judul buku Cornelius Plantinga: *not the way it’s supposed to be*.¹⁷ Hal tersebut adalah salah satu dosa Israel.

Allah telah memiliki rencana atas hidup umat Israel sebagaimana mereka dipanggil sebagai umat pilihan Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Akan tetapi Israel malah memilih untuk meleburkan diri dengan bangsa tersebut sehingga bukan mereka lagi yang memberikan pengaruh, justru mereka yang terpengaruh dengan budaya, kebiasaan dan

17. Cornelius Plantinga Jr, *Not the Way It’s Supposed to Be* (Grand Rapids: Eerdmans, 1995).

kepercayaan-kepercayaan bangsa-bangsa lain. Keinginan Israel untuk memilih seorang raja hanya satu dari sekian banyak kecerobohan Israel yang mendukakan hati Yahweh, Allah mereka. Kondisi tersebut jugalah yang kemudian membuat Israel jatuh ke tangan bangsa asing, hidup dalam pembuangan, dan menjadi bangsa yang tak bertanah air. Masalah tersebut semakin berlarut-larut sampai abad ke-21 ini di mana usaha Israel yang mengklaim sebagai pemilik tanah justru menimbulkan peperangan dan penderitaan. Benturan politik antara Israel modern dan Palestina juga berimbas kepada negara-negara tetangga, bahkan ketegangan tersebut juga memicu ketegangan di negara-negara lain.¹⁸ Semua ini tidak lepas dari dosa dan pemberontakan Israel sebagai bangsa yang susah diatur dan ingin berbuat apa yang mereka pandang baik menurut diri mereka sendiri. Dengan demikian, maka benar dan genaplah apa yang menjadi peringatan TUHAN melalui Samuel yang mengatakan, “Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi TUHAN tidak akan menjawab kamu pada waktu itu.” (1 Sam. 8:18)

Dengan demikian maka terjawablah bahwa suara rakyat tidak selalu sama dengan suara Tuhan. Itu sebabnya tindakan kekerasan atas nama suara rakyat (mayoritas) tidak dapat dibenarkan. Menganggap suara rakyat adalah suara kebenaran juga dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan demokrasi seperti

18. Yonky Karman, *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 76.

yang terjadi dalam revolusi Perancis ataupun yang juga seringkali dijumpai di Indonesia. Misalnya ketika sekelompok orang hendak menyampaikan aspirasinya tetapi dibarengi dengan tindakan anarkis serta perusakan terhadap fasilitas umum. Mereka yang melakukan tindakan tersebut biasanya mengatasnamakan suara rakyat.

Penutup

Meskipun tindakan Israel meminta seorang raja tidak sesuai dengan maksud Allah, namun Allah tetap setia kepada perjanjian-Nya sebagaimana yang telah Ia nyatakan kepada nenek moyang Israel. Ia tetap memelihara kelangsungan hidup umat pilihan-Nya. Rencana Allah tidak mungkin digagalkan oleh rencana ciptaan-Nya sendiri. Oleh sebab itulah, Allah tetap berjalan mengiringi kehidupan umat-Nya dan pemerintahan Allah atau kerajaan Allah itu kemudian bermuara kepada pengharapan mesianis yang dirindukan oleh bangsa Israel sendiri. Suatu pemerintahan yang ideal dan sempurna, di mana Allah duduk bertakhta sebagai Raja yang memerintah dengan keadilan-Nya.

Penulis menarik suatu kesimpulan awal bahwa dari teokrasi kembali kepada teokrasi, itulah bentuk pemerintahan sempurna yang seharusnya dimiliki oleh Israel dan umat Allah masa kini. Pemerintah dunia berorientasi kepada kekuasaan dan kedudukan. Akibatnya, ketidakadilan dan rasa tidak puas hadir di mana-mana. Israel tidak pernah lagi benar-benar menjadi suatu bangsa meskipun

mereka kembali memperoleh tanah mereka dan diakui sebagai bangsa pada tahun 1948. Akan tetapi kepemilikan tersebut tidaklah sama lagi dengan kepemilikan atas tanah perjanjian sebagaimana yang mula-mula Allah janjikan kepada nenek moyang mereka.

Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan, *tidak benar* bahwa suara rakyat *pasti* adalah suara Tuhan (*vox populi* tidak identik dengan *vox Dei*). Suara rakyat atau suara mayoritas, tidak selalu merupakan kehendak Ilahi. Suara mayoritas yang berseru “salibkan Dia!” bukanlah suara Tuhan, suara mayoritas yang berseru “bunuh Ahmadiyah!” bukanlah suara Tuhan. Karena itu, tepatlah sebagaimana yang dikatakan oleh Yonky Karman, “mayoritas tidak selalu keliru, tetapi mayoritas juga tidak menentukan kebenaran. Ketiadaan sikap kritis terhadap mayoritas melumpuhkan kepekaan terhadap kebenaran.”¹⁹ Suara Tuhan pastilah untuk kebaikan banyak orang, bukan untuk kepentingan segelintir orang yang ingin memuaskan keinginannya. Tuhan memang dapat memakai rakyat untuk menyuarakan suara-Nya. Tetapi niscaya suara Tuhan yang keluar melalui mulut rakyat adalah suara yang menentang ketidakadilan, kesewenang-wenangan, keserakahan, dan kemunafikan yang mendatangkan kesengsaraan kehidupan rakyat.

19. Yonky Karman, “Nabi Shalom di Negeri Krisis Damai Sejahtera,” *Wacana Biblika 11* (2011): 10.